

TANTANGAN PENDIDIKAN INKLUSI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Winarti

A. PENDAHULUAN

Negara-negara Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini dimaksudkan agar daya saing Asean meningkat serta bisa menyaingi Cina dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Hadirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia membuka lapangan kerja secara luas dan membuat semakin ketatnya persaingan tenaga kerja karena MEA memungkinkan kemudahan dalam merekrut tenaga kerja asing yang lebih profesional. Jika tidak disiapkan maka ada kemungkinan negara kita hanya menjadi penonton dan pasar saja bagi negara asing. MEA tidak hanya berimbas kepada bidang ekonomi saja tetapi jelas akan masuk pula pada dunia pendidikan. Pendidikan mencetak para generasi penerus untuk dapat bersaing di kancah Asean maupun Internasional.

Indonesia memiliki tantangan yang berat untuk menghadapi MEA yaitu tantangan sumber daya manusia (SDM) yang terlihat kurang siap untuk bersaing di kancah ASEAN. Berdasarkan kajian BPS 2014 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun yang bekerja berdasarkan pendidikan secara berurutan adalah: SD sebanyak 46,8%, SLTP 17,82%, SLTA 25,23% dan pendidikan tinggi 10,14%. Apakah dengan komposisi yang demikian memberi keyakinan kepada kita akan kesiapan menghadapi MEA di akhir tahun 2015.

Pendidikan mengemban tugas dalam menyiapkan SDM Indonesia yang mampu bersaing dalam menghadapi MEA ini. Peran pendidikan tentulah sangat besar, baik pendidikan secara formal, non formal, dan informal.

Pada makalah ini akan dibahas sejauh mana kesiapan dan tantangan pendidikan inklusi dalam menyongsong MEA. Mengingat bahwa masyarakat atau siswa difabel adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang sedikit terabaikan yang tentunya juga akan mengalami dampak dari MEA.

B. Pendidikan Sains

Menurut Carin & Sund. (2005), kata *science* sebagai “ *both a body of knowledge and a process*”. Sains diartikan sebagai bangunan ilmu pengetahuan dan proses. Sains didefinisikan mempunyai tiga elemen penting yaitu sikap, proses dan produk. Makna sains mencakup tiga komponen utama yaitu komponen sikap, proses serta produk (hasil) dari kegiatan. Komponen sikap menekankan pada kegiatan dan pola pikir, yang dilakukan dan diharapkan dapat menjadi sikap yang tetap dilakukan dalam setiap aktivitas kehidupan. Produk sains merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan ilmiah, dapat berbentuk konsep, teori, hukum dan postulat. Produk ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam melakukan pengamatan dan penelitian selanjutnya.

National Science Educational Standart (1996: 20) menyatakan bahwa “ *Learning science is an active process. Learning science is something student to do, not something that is done to them*”. Dalam pembelajaran sains siswa dituntut untuk belajar aktif yang

terimplikasikan dalam kegiatan secara fisik ataupun mental, tidak hanya mencakup aktivitas *hands-on* tetapi juga *minds – on*.

Dalam kerangka kompetensi *21st Century Skills* menunjukkan bahwa berpengetahuan (melalui core subject) saja tidak cukup, harus dilengkapi dengan; 1) kemampuan kreatif-kritis, (2) berkarakter kuat, (3) didukung dengan kemampuan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Dadan, 2012).

Kang, Kim, Kim & You dalam Purwanti (2013) memberikan kerangka *21st century* dalam domain kognitif, afektif, dan budaya sosial. Domain kognitif terbagi dalam sub domain : kemampuan mengelolan informasi, yaitu kemampuan menggunakan alat, sumberdaya dan ketrampilan inkuiri melalui proses penemuan; kemampuan mengkonstruksi pengetahuan dengan memproses informasi, memberikan alasan, dan berpikir kritis; kemampuan menggunakan pengetahuan melalui proses analistis, menilai, mengevaluasi, dan memecahkan masalah; dan kemampuan memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan metakognisi dan berpikir kreatif.

Dari kriteria-kriteria di atas kita sudah bisa membayangkan pembelajaran seperti apa seharusnya yang diberikan pada anak didik kita. Pembelajaran sains sudah seharusnya dilaksanakan dengan pendekatan berpusat pada siswa (*student centered learning*) untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif (*creative thinking*) dan berpikir kritis (*critical thinking*), mampu memecahkan masalah, melatih kemampuan inovasi dan menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi. Keterampilan berpikir yang dikembangkan sebaiknya sudah menjangkau keterampilan berpikir tingkat tinggi (*High Order Thinking Skills*) yang jika dijangkau dengan ranah kognitif pada Taksonomi Bloom berada pada level analisis, sintesis, evaluasi dan kreasi.

Kemampuan berpikir merupakan aspek penting dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemampuan berpikir yang mendasar dalam proses pendidikan. Kemampuan berpikir seseorang dapat mempengaruhi kemampuan pembelajaran, kecepatan dan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, keterampilan berpikir dikaitkan dengan proses belajar. siswa yang dilatih untuk berpikir menunjukkan dampak positif pada pengembangan pendidikan mereka (Yee Mei Heong, 2011).

Pembelajaran IPA melalui metode ilmiah dapat membangun siswa beripikir kreatif, berpikir ilmiah dalam memecahkan permasalahan , berpikir kritis. Jika kompetensi ini dimiliki oleh setiap lulusan jenjang pendidikan tentunya akan menjadi modal yang kuat dalam bersaing di kancah ASEAN.

Implementasi di lapangan hal tersebut belum terjadi di pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus belum terfasilitasi dengan baik dalam belajar fisika. Sekolah berlabel inklusi seharusnya bisa memfasilitasi terjadinya proses belajar yang bermutu. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa banyak sekali faktor yang menjadi penghambat bagi terlaksananya pembelajaran fisika di sekolah inklusi diantaranya adalah ketidaksiapan guru dan sarana prasarana (Winarti, 2013). Jangan kan untuk melakukan metode ilmiah dalam sebuah praktikum fisika, untuk belajar fisika di kelas saja masih sangat terhambat sekali. Disisi lain anak-anak difabel yang bersekolah di sekolah inklusi dituntut dengan kriteria kelulusan yang sama dengan anak normal.

C. Pendidikan Inklusi dan Tantangannya.

Pendidikan inklusif pada tahun 1980-an di Indonesia dikenal dengan pendidikan terpadu yang pada hakekatnya adalah layanan pendidikan, dimana anak berkebutuhan

khusus atau *children with special needs*, secara inklusif menempuh pendidikan mereka bersama-sama dengan anak lainnya di sekolah atau di lembaga pendidikan umum. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara Inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Sapon-Shevin dalam Sari Rudiwati (2005) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus pendidikan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya.

Pendidikan inklusi merupakan sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam pendidikan. Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman inklusi dan implikasinya
 - a. Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah reguler dalam rangka *give education right*.
 - b. Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
 - c. Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap *proactive* dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.
2. Kebijakan sekolah
 - a. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.
 - b. Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar ABK, serta keharusan orang tua ABK dalam penyediaan guru khusus.
3. Proses pembelajaran
 - a. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk *team teaching*, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
 - b. Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan kurikulum, menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
 - c. Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
 - d. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, *resource*, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
 - e. Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam.

- f. Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuan belajar yang berarti.
4. Kondisi guru
 - a. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang belum sensitif dan proaktif dalam menangani ABK di kelas inklusi.
 - b. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.
 - c. Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai.
 5. Sistem dukungan
 - a. Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi – LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
 - b. Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya.
 - c. Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik.
 - d. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal.
 - e. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitaian belum dapat diwujudkan dengan baik.
 - f. Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun bantuan teknis, dinilai masih kurang perhatian dan kurang proaktif terhadap permasalahan nyata di lapangan.
 - g. Walaupun pemerintah saat ini sudah mengikutkan guru-guru dalam pelatihan atau memberikan bantuan yang sifatnya fisik atau keuangan, namun jumlahnya masih sangat terbatas dan belum merata.
 - h. Sekolah umumnya juga belum didukung fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aksesibilitas dan keberhasilan pembelajaran secara memadai.

Menurut Sunardi (2009), kendala lain yang muncul meliputi:

1. Sistem Penerimaan Siswa Baru, khususnya di tingkat pendidikan menengah dan atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan. Siswa hanya dapat diterima kalau hasil ujian nasionalnya memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah.
2. Dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya dalam mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragamannya.
3. Penggunaan label sekolah inklusi dan adanya PP. No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 41(1) tentang keharusan untuk memiliki tenaga kependidikan khusus bagi sekolah inklusi sebagai alasan melakukan penolakan masuknya anak berkelainan ke sekolah yang bersangkutan, yang

ditandai dengan munculnya gejala “eklusivisme baru”, yaitu menolak anak berkebutuhan khusus dengan alasan belum memiliki tenaga khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusi.

4. Kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak – anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).
5. Masih dipahaminya pendidikan inklusi secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak difabel ke sekolah regular, tanpa upaya untuk mengakomodasi kebutuhan khususnya. Kondisi ini dapat menjadikan anak tetap tereklusi dari lingkungan karena anak merasa tersisih, terisolasi, ditolak, tidak nyaman, sedih, marah, dan sebagainya. Padahal makna inklusi adalah ketika lingkungan kelas atau sekolah mampu memberikan rasa senang, menerima, ramah, bersahabat, peduli, mencintai, menghargai, serta hidup dan belajar dalam kebersamaan.
6. Munculnya label-label khusus yang sengaja diciptakan oleh pemerintah maupun masyarakat yang cenderung membentuk sikap eksklusifisme, seperti Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Internasional (SBI), Sekolah Rintisan Berstandar Internasional (RSBI), sekolah favorit, sekolah percontohan, kelas akselerasi, serta sekolah-sekolah yang berbasis agama. Kondisi ini tentu dapat berdampak kepada sekolah inklusi sebagai sekolah kelas dua (second class), karena menerima ABK sama dengan special school (Imam Subkhan, 2009)
7. Masih terbatasnya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan pendidikan inklusi secara matang dan komprehensif, baik dari aspek sosialisasi, penyiapan sumber daya, maupun uji coba metode pembelajaran, sehingga hanya terkesan program eksperimental (Cak Fu, 2005).

D. KESIMPULAN

MEA tidak boleh dipandang hanya dari sisi ekonomi saja tetapi juga menjadi cukup beraat bagi dunia pendidikan. SDM Indonesia harus mampu bersaing dengan SDM asing yang notabene nya memiliki kemampuan yang profesional dan keahlian yang lebih dari kita. Sudah seharusnya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung terciptanya SDM yang mampu berkecimpung di MEA. Peran dunia pendidikan menjadi ujung tombak dalam rangkaian ini. Sekolah adalah institusi yang paling memungkinkan untuk menyiapkan sumber daya manusia memiliki kesiapan dan kompetensi dalam menghadapi MEA. Institusi sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran yang juga berorientasi pada kesiapan SDM Indonesia menghadapi MEA. Pendidikan sains berperan dalam menciptakan SDM yang berkualitas. Melalui pembelajaran pendidikan sains yang layak tentunya akan membuat SDM kita siap menyongsong MEA dan tanpa kecuali bagi para difabel. Kompetensi, inovasi, kreatifitas merupakan suatu keniscayaan dalam menyongsong MEA.

DAFTAR PUSTAKA

- Carin, Arthur A & Robert B. Sund. (2005). *Teaching science through discovery*. Columbus : Charles E. Merrill Publishing Company
- Convention on the Rights of the Child. United Nations General Assembly resolution 44/25, Diunduh pada 28 Mei 2015
- Dadan Rosana. (2012). *Menggagas Pendidikan IPA yang Baik Terkait Esensial 21st Century*

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Fisika 2015)
<http://snpf.ikippgrimadiun.ac.id/prosiding.php>

- Skills*. Disampaikan pada Seminar Nasioanal Pendidikan IPA ke IV, Unesa: Surabaya..
- Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Belajar SD, SMP, dan SMA: Suatu Model Pelayanan Pendidikan Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa*, Jakarta: Balitbang Diknas, 2003.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Sistem Pendidikan Nasional No.20, Tahun 2003*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006. Mitchell, D. 2006. *Special Education Needs and Inclusive Education: Major Themes in Education*, New York : Publisher's Di unduh pada 28 mei 2015. <http://books.google.co.jp/books?id=b69gCu5Ywes-C&pg=PA200&lpg=PA200&dq>.
- Purwanti Widhy. *Integrative Science untuk Mewujudkan 21st Century Skill dalam Pembelajaran IPA SMP*. Seminar Nasional MIPA 2013 UNY. Di Unduh pada 7 Juni 2015. <http://uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Purwanti%20Widhy%20Hastuti,%20S.Pd.,%20M.Pd./Integrative%20Science.pdf>
- Sunardi. (2006). *Peran Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkelainan*. Jakarta: Madina.
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Salamanca: UNESCO & Ministry Of Education And Science, Spain.
- Winarti. (2013). *Identifikasi Faktor Penghambat Siswa Tunanetra dalam Belajar Fisika di Sekolah Inklusi*. Penelitian tidak diterbitkan. UIN Sunan Kalijaga.
- Yee Mei Heong, Widad Binti Othman, Jailani Bin Md Yunos, 2011, The Level of Marzano Higher Order Thinking Skills Among Technical Education Students, *International Journal of Social Science and Humanity*, Vol. 1, No. 2, July 2011.